

# JURNAL

# KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI

# KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Vol. 2 No. 2	Hal. 85- 173	Jakarta Tahun 2012	ISSN 2089-6980
---	--------------	--------------	-----------------------	-------------------

Diterbitkan bersama :



Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan



Jaringan Riset Sosial Ekonomi  
Kelautan dan Perikanan

## JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

---

---

### Volume 2 Nomor 2, Desember 2012

#### Penanggung Jawab :

Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

#### Dewan Redaksi :

Dr. Zahri Nasution (*Sosiologi Perikanan*)  
Dr. Sonny Koeshendrajana (*Ekonomi Sumberdaya*)  
Prof. Dr. I Wayan Rusastra (*Analisis Kebijakan dan Agribisnis*)  
Dr. Dedi Supriadi Adhuri (*Antropologi Maritim*)  
Dr. Armen Zulham (*Ekonomi Perikanan*)

#### Mitra Bestari :

Dr. Fatuchri Sukadi (*Kebijakan Perikanan Budidaya*)  
Dr. Victor Nikijuluw (*Kebijakan Publik*)  
Dr. Andin H. Taryoto (*Sosiologi Pedesaan*)

#### Redaksi Pelaksana :

Yayan Hikmayani, M.Si  
Tjahjo Tri Hartono, M.Si  
Tenny Apriliani, M.Si

#### Desain dan Tata Letak :

Ilham Ferbiansyah

#### Alamat Redaksi :

Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan  
Jl. KS. Tubun Petamburan VI - Jakarta 10260  
Telp. (021) 53650162  
Faks.(021) 53650159  
Email: pt.bosek@gmail.com

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKRSE-KP) yang telah terakreditasi berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 482/D/2011 tanggal 12 April 2011; secara spesifik memuat kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Evaluasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; (ii) Evaluasi Kebijakan Pengaturan Sistik Bagi Hasil (Kasus Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 Pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali); (iii) Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Coremap di Wilayah *Coral Triangle* di Indonesia Timur; (iv) Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran Dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional); (v) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di Padang Sumatera Barat; (vi) Dampak Penerapan Sertifikasi Perdagangan Ikan Hias Laut Pada Kondisi Ekosistem Terumbu Karang Dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kepulauan Seribu; (vii) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis).

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

**Redaksi**

**JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Volume 2 Nomor 2, Tahun 2012**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Evaluasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	
<i>Oleh : Yayan Hikmayani, Maharani Yulisti dan Hikmah .....</i>	85 - 102
Evaluasi Kebijakan Pengaturan Sisitim Bagi Hasil (Kasus Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 Pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali)	
<i>Oleh : Rizky Muhartono, Ahmad Zamroni dan Zahri Nasution .....</i>	103 - 112
Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Coremap di Wilayah <i>Coral Triangle</i> di Indonesia Timur	
<i>Oleh : Siti Hajar Suryawati dan Agus Heri Purnomo .....</i>	113 - 130
Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran Dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional)	
<i>Oleh : Anugerah Yuka Asmara .....</i>	131 - 144
Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di Padang Sumatera Barat	
<i>Oleh : Tomi Ramadona, Tridoyo Kusumastanto dan Achmad Fahrudin .....</i>	145 - 154
Dampak Penerapan Sertifikasi Perdagangan Ikan Hias Laut Pada Kondisi Ekosistem Terumbu Karang dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kepulauan Seribu	
<i>Oleh : Idris dan Aar Mardesyawati .....</i>	155- 162
Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis)	
<i>Oleh : Atikah Nurhayati .....</i>	163 - 173

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 338:639.2

Evaluasi Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Yayan Hikmayani, Maharani Yulisti dan Hikmah

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan peningkatan produksi perikanan tahun 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan perhitungan kecenderungan produksi perikanan budidaya nasional/wilayah, analisis proyeksi produksi (*forecasting*) perikanan budidaya di Indonesia dan analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi yang telah dicanangkan yaitu sebesar 353% pada prinsipnya masih cukup relevan dan sangat optimis untuk tercapai. Hasil *forecasting* yang telah dilakukan menghasilkan nilai sebesar 335% dan tidak terlalu jauh dengan nilai yang ditargetkan. Proyeksi patin menunjukkan peningkatan produksi sampai tahun 2014 sebesar 253%, menunjukkan antara target produksi dan realisasi sangat jauh perbedaannya. Proyeksi produksi perikanan budidaya untuk komoditas lele, menunjukkan peningkatan produksi sampai dengan 781% di tahun 2014, jauh lebih besar dibanding target produksi perikanan budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sebesar 450 %. Upaya yang dapat dilakukan agar target produksi tercapai yaitu melalui optimalisasi luasan lahan yang belum diusahakan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya, distribusi produk perikanan yang merata di seluruh Indonesia dengan mempermudah birokrasi, meningkatkan jumlah dan kapasitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di lokasi sentra produksi potensial, kebijakan pemerintah mengenai harga pakan, subsidi harga input produksi terutama pakan perikanan budidaya dan kebijakan pemerintah dalam pelarangan impor ikan.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, perikanan budidaya, produksi

---

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 330.31

Evaluasi Kebijakan Pengaturan Sistim Bagi Hasil  
(Kasus Implementasi Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 pada Perikanan Rumpon di  
Kabupaten Badung, Bali)

Rizky Muhartono, Ahmad Zamroni dan Zahri Nasution

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi UU Bagi Hasil No. 16/1964. Pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*. Responden yang terpilih merupakan nelayan rumpon yang telah bekerja minimal satu tahun. Mengacu pada pendekatan evaluasi kebijakan, analisis mencakup aspek materi, aspek implementasi dan aspek faktor penentu. Dari pendekatan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Pertama, teridentifikasi adanya ketidaksesuaian penerapan UU di lapangan, antara lain dalam hal besaran proporsi, beban tanggungan, dan jangka waktu perjanjian; Kedua, kelemahan yang menyebabkan penyimpangan tersebut, terjadi baik pada aspek materi maupun implementasi. Pada aspek materi, ditemukan bahwa produk hukum tersebut tidak selaras dengan kondisi lokal, termasuk adat setempat. Sementara itu, pada aspek implementasi, produk hukum tersebut tidak berjalan baik karena keterbatasan informasi, ketiadaan ruang untuk modifikasi, dan ketiadaan lembaga kontrol yang secara efektif mengawal pelaksanaannya. Rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Beberapa pasal UU 16/1964 sebaiknya disempurnakan, yaitu yang menyangkut bagian pemilik modal, biaya penyusutan aset, dan umur ekonomis aset produksi dalam perhitungan bagi hasil; (2) Perlu diberikan mandat khusus kepada sebuah lembaga yang untuk melakukan pengawalan implementasi UU sehingga efektivitas UU dapat ditingkatkan; (3) Perlu disusun sebuah naskah akademis yang dikembangkan berdasarkan perluasan cakupan kajian ini, yang digunakan untuk mendorong penyempurnaan UU, sehingga selaras dengan kondisi saat ini, demi perkembangan perikanan yang lebih baik.

Kata Kunci: evaluasi kebijakan, bagi hasil, perikanan rumpon, Kedonganan, Bali

---

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.25

Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Terumbu Karang Coremap di Wilayah *Coral Triangle* di Indonesia Timur

Siti Hajar Suryawati dan Agus Heri Purnomo

Tulisan ini mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah *Coral Triangle* Indonesia, yang didasarkan atas hasil penelitian pada Tahun 2011, di lokasi-lokasi *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (COREMAP). COREMAP adalah program pengelolaan sumber daya terumbu karang yang merupakan wahana utama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan terumbu karang. Kebijakan tersebut dilatar-belakangi oleh degradasi yang terjadi pada sumber daya terumbu karang dan besarnya potensi serta pentingnya fungsi dari aset alam tersebut. Metode yang diacu untuk penyusunan rekomendasi ini adalah analisis Sistem Sosial Ekologis (SES) dan analisis resiliensi yang mencakup perilaku positif dan negatif dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, dilanjutkan dengan analisis *Multi Criteria Decision Making* (MCDM) terhadap perilaku-perilaku pengelolaan negatif. Data dalam penelitian ini mencakup aspek sistem sosial-ekologi, kerentanan dan resiliensi, yang diperoleh dari 1.244 responden masyarakat yang dipilih secara *purposive* dan 182 responden tokoh yang diperoleh dengan teknik *snowball* serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini secara umum merekomendasikan 4 (empat) perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan yang ada. Keempat rekomendasi tersebut adalah: 1) Peningkatan efektivitas Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Taman Wisata Air Laut (TWAL) melalui penguatan kerjasama masyarakat-pemerintah dalam upaya-upaya menciptakan mata pencaharian alternatif, terutama di sektor non konvensional seperti pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi; 3) Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait dalam pengawasan terhadap sumber daya; dan 4) Perbaikan desain program sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan.

Kata Kunci: terumbu karang, strategi pengelolaan, COREMAP, wilayah timur Indonesia

---

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 382(9.0)

Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional)

Anugerah Yuka Asmara

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya di perbatasan antar negara. Beberapa pelanggaran batas laut negara yang telah ditetapkan melalui zona ekonomi eksklusif (ZEE) tiap tahun marak terjadi. Misalnya penangkapan ikan oleh nelayan asing, eksplorasi tambang di bawah laut oleh beberapa perusahaan asing menyebabkan pencemaran laut di batas negara, dan minimnya penggunaan iptek dalam pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. Tujuan penelitian dalam studi ini ialah : 1) Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Norwegia dalam menguatkan posisi wilayah laut negaranya sekaligus pengelolaan sumber daya laut yang ada di dalamnya dan 2) Mengelaborasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam mengambil beberapa pelajaran dari keberhasilan negara Norwegia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan literatur atau studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengambil praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari keberhasilan suatu negara dalam mengimplementasikan program. Hasil tinjauan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa pembelajaran kebijakan pengelolaan kelautan dari Norwegia sebagai salah satu negara yang memiliki geografi laut cukup luas patut menjadi contoh bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan secara geografis dan sistem pemerintahannya memiliki kemiripan di antara keduanya, meskipun Indonesia sebagai negara maritim terluas di dunia memiliki tantangan lebih berat dari pada Norwegia yang secara geografis lebih kecil dari Indonesia.

Kata Kunci : kebijakan, pemerintah, Iptek, pengelolaan, kelautan, perbatasan

---

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 338.922:639

Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan dan Berperspektif Mitigasi Bencana di Padang Sumatera Barat

Tomi Ramadona, Tridoyo Kusumastanto dan Achmad Fahrudin

Penelitian yang bertujuan untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berperspektif mitigasi bencana telah dilakukan di Kota Padang Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan pendekatan sensus. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan skunder. Pengambilan data dilakukan secara *purposive sampling*. Responden terdiri dari nelayan yang mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dengan komoditas tuna. Metode analisis data menggunakan analisis bioekonomi, kelayakan investasi, *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-sektor perikanan memberikan pengaruh cukup besar bagi perekonomian Kota Padang. Pemanfaatan sumber daya tuna masih berada dibawah optimalnya. Pengelolaan optimal tuna dengan menggunakan rezim pengelolaan *Maximum Equilibrium Yied (MEY)* dengan *discount rate* sebesar 16% yaitu dengan meningkatkan upaya sebesar 133 trip dan produksi sebesar 418,53 ton. Potensi bencana terbesar di Padang yang berdampak pada perikanan yaitu gempa bumi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arahan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Kota Padang yaitu mengembangkan sarana dan prasarana perikanan yang berperspektif mitigasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat lokal dan kondisi daerah serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka optimasi produktivitas perikanan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kebijakan, sumberdaya perikanan, bioekonomi, keberlanjutan, mitigasi bencana

---

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 639.9:64

Dampak Penerapan Sertifikasi Perdagangan Ikan Hias Laut

Pada Kondisi Ekosistem Terumbu Karang dan Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Kepulauan Seribu

Idris dan Aar Mardesyawati

Sertifikasi ikan hias diterapkan di Kepulauan Seribu pada 2003-2006 oleh MAC berdasarkan kebutuhan pembeli yang menginginkan ikan hias laut yang sehat dan ditangkap dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan program sertifikasi perdagangan ikan hias laut terhadap kondisi ekosistem terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi nelayan di Kepulauan Seribu. Studi ini dilaksanakan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Studi ini menggunakan tiga metode, yaitu diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, dan kuisioner. Responden dalam studi ini terdiri dari kelompok nelayan dan pengepul ikan hias (belum dan sudah tersertifikasi), tokoh masyarakat, ketua kelompok nelayan, dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 73% responden menyatakan kondisi terumbu karang di lokasi tangkap masih dalam kategori baik. Sementara, sebanyak 58% responden menyatakan kondisi ikan hias cenderung meningkat. Pada aspek sosial dan ekonomi, sebanyak 62% responden merasa lebih aman dalam menangkap ikan karena tidak melanggar hukum, sebanyak 96% responden menyatakan sangat baik dalam hal penyelesaian masalah melalui kelompok, dan sebanyak 96% responden menyatakan memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Namun, hanya sebanyak 42% responden yang menyatakan ada perbaikan harga jual ikan hias dari nelayan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah program ini bisa mengubah persepsi masyarakat untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang. Secara sosial, keamanan dan kesehatan nelayan cenderung meningkat. Secara ekonomi, program ini tidak memberikan perbaikan atau peningkatan harga ikan hias pada tingkat nelayan.

Kata Kunci: nelayan ikan hias, sertifikasi, sosial ekonomi, Kepulauan Seribu

---

**INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**( ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES )**

ISSN 2089-6980

Vol. 2 No. 2, 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya

UDC 338:639

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tingkat Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis)

Atikah Nurhayati

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendekatan model sinergitas perilaku ekonomi nelayan (Suatu Kasus di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat). Analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarkhi Process (AHP). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui alternatif kebijakan *Co-Management* berpengaruh sebesar 44,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengendalian upaya penangkapan memiliki nilai bobot 0,336 artinya kebijakan pemerintah melalui pengendalian upaya penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot 0,131 artinya kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum dan kelembagaan memiliki nilai bobot 0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah melalui penegakan hukum dan kelembagaan memiliki pengaruh sebesar 0,88% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan *Co-management* memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di Kawasan Pangandaran Provinsi Jawa Barat.

Kata Kunci: kebijakan, nelayan, sinergitas perilaku ekonomi

---

**(Indeks Pengarang)**  
**(Author Index)**

Asmara, Anugerah Yuka .....	131-144
Fahrudin, Achmad .....	145-154
Hikmah .....	85-102
Hikmayani, Yayan .....	85-102
Idris .....	155-162
Kusumastanto, Tridoyo .....	145-154
Mardesyawati, Aar .....	155-162
Muhartono, Rizky .....	103-112
Nasution, Zahri .....	103-112
Nurhayati, Atikah .....	163-173
Purnomo, Agus Heri .....	113-130
Romadona, Tomi .....	145-154
Suryawati, Siti Hajar .....	113-130
Yulisti, Maharani .....	85-102
Zamroni, Ahmad .....	103-112

# JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

## Pedoman Bagi Penulis

**NASKAH.** Redaksi hanya menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan dan tidak dalam proses penerbitan pada publikasi lain. Misi publikasi ini adalah membahas isu aktual kebijakan kelautan dan perikanan dalam bentuk gagasan, dialog maupun polemik. Sesuai dengan misi tersebut, maka naskah harus mengandung pembahasan tentang isu analisis kebijakan kelautan dan perikanan yang aktual.

**BENTUK NASKAH.** Susunan naskah relatif bebas, namun harus memuat permasalahan, pendekatan yang digunakan dalam analisis masalah, pemecahan isu kebijakan dan penutup, Naskah diketik dengan menggunakan huruf Calibri, 12pt dan 1,5 spasi.

**PENUTUP.** Menyajikan sinopsis naskah dengan menampilkan opsi kebijakan untuk memecahkan masalah tematik atau isu kebijakan yang ada. Kebijakan yang ditawarkan perlu dikomplementasikan dengan kebijakan pendukung lintas sektoral dan koordinasi institusi terkait dalam implementasinya.

**PENYERAHAN NASKAH .** Naskah diserahkan ke Redaksi Pelaksana.

**BAHASA.** Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia.

**JUDUL NASKAH.** Judul naskah dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

**ABSTRAK.** Setiap naskah dilengkapi abstrak yang terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris terdiri dari 250 kata.

**KATA KUNCI.** Pemilihan kata kunci mengacu pada description yang tercantum dalam AGROVOC. Apabila istilah yang dipilih tidak terdapat dalam AGROVOC, maka thesaurus lain atau kamus istilah dapat dipakai sebagai rujukan.

**TABEL.** Tabel data mencantumkan teks isi, tahun dan sumber data (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

**GAMBAR DAN GRAFIK.** Gambar dan grafik harus dicetak tebal sehingga memungkinkan diperkecil antara 50 sampai 60% dari teks asli. Judul gambar dan grafik diletakan di bawah tanpa mempengaruhi bagian gambar dan grafik (dalam bahasa Indonesia dan Inggris).

**SATUAN PENGUKURAN.** Satuan pengukuran dalam teks, grafik dan gambar memakai sistem metrik, misalnya cm, ton, ha.

**REFERENSI.** Referensi ditulis dalam bentuk catatan kaki atau pada halaman daftar pustaka yang disusun dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah dan penerbit.



**BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JL. KS Tubun Petamburan VI, Jakarta Pusat 10260

Telp : 021-53650162 Fax : 021-53650159

Web : [www.bbrse.kkp.go.id](http://www.bbrse.kkp.go.id)

[www.bbrse.net](http://www.bbrse.net)

email : [pt.losek@gmail.com](mailto:pt.losek@gmail.com)

ISSN **2089-6980**

